



PENETAPAN

Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh: -----

Ajaji Bin H. Madsuki, umur 51, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Bojong RT. 008 RW. 003 Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I; -----

Rodiah Binti Ruan, umur 41, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Bojong RT. 008 RW. 003 Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 mengajukan permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang pada tanggal 05 November 1988; -----

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dalam usia 23 tahun dan Pemohon II dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung bernama Ruan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ust. Moh. Hasanudin dan Ust. Superben dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; -----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama :
 - 4.1. Haikal Murdi (telah meninggal dunia); -----
 - 4.2. Aang Kunaefi, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Januari 1990; -----
 - 4.3. Robi Maulana, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 Oktober 1994; -----
 - 4.4. Nurfitri, perempuan, lahir di Tangerang, 22 Januari 1997; -----
 - 4.5. Siti Kamilutunnadia, perempuan, lahir di Tangerang, 20 Desember 2001; -----
 - 4.6. Siti Raudatul Wida, perempuan, lahir di Tangerang, 5 Oktober 2000; ---
 - 4.7. Nurul Fakhri, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Oktober 2008; -----
 - 4.8. Sofiatunnada, perempuan, lahir di Tangerang, 07 Juni 2011; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah; -----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 1988 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ajaji bin H. Madsuki (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; -----
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rodiah binti Ruan (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2; -----
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri atas nama para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, P.3; -----
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4; -----

B. Saksi :

1. Nama Hasanudin bin Rosimin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Bojong RT 008 RW 003 Desa Bojong Cikupa Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon; -----
- Saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon I; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri; -----
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada sekitar tahun 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang dan saksi hadir pada saat pernikahannya; ---
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Ruan; -----
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri dan Ust. Superben, dengan mas kawin berupa uang; -----
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I jelek dan Pemohon II masih gadis; -----
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, selama berumah tangga telah dikaruniai 8 (delapan) anak; -----
- Bahwa pernikahan mereka dahulu tidak dicatat dan sekarang membutuhkan untuk bukti nikahnya; -----

2. Nama Superben bin Usup, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Leuweung Gede RT 005 RW 003 Desa Parahu Kecamatan Sukanulya Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon; -----
- Saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon I; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri; -----
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada sekitar tahun 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang dan saksi hadir pada saat pernikahannya; ---
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Ruan; -----
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri dan Ust. Hasanudin, dengan mas kawin berupa uang; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I jelek dan Pemohon II masih gadis; -----
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, selama berumah tangga telah dikaruniai 8 (delapan) anak; -----
- Bahwa pernikahan mereka dahulu tidak dicatat dan sekarang membutuhkan untuk bukti nikahnya; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, para Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai asas personalitas keislaman berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengesahan sahny suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa identitas para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa setempat dan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah cukup membuktikan para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang didasarkan pada penglihatan atau pendengarannya sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulannya, keterangan para saksi tersebut saling terkait dan saling berhubungan serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian; -----

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I (Ajaji bin H. Madsuki) dengan Pemohon II (Rodiah binti Ruan), telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 05 November 1988 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; ---
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Ruan, dihadiri oleh saksi-saksi dengan mas kawin berupa uang; --
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larang lainnya secara syar'i; -----
4. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon I sebagai jejaka sedangkan Pemohon II sebagai perawan; -----
5. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai anak dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan; -----
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan mereka sangat membutuhkan untuk kepastian hukum perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 05 November 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut dan perkawinan tersebut dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan permohonan untuk disahkan oleh pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat di ajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengani perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974 serta perkawinan mana para Pemohon masih dibawah umur serta belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya : ---

لَبْقِي رَارِقًا ابْلَا غُلْ اَعْلًا لَقْ حَاكِبْ قَارْمَا نَأْمَقْدَصْ

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ajaji bin H. Madsuki) dengan Pemohon II (Rodiah binti Ruan) yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 1988 di wilayah hukum Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang; -----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya sebagai tempat perkawinan tersebut dilangsungkan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang sebagai tempat tinggal para Pemohon; -----
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak berperkara; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. Fitriyel Hanif, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.